

# **Strategi *Multifinance* dalam Menghadapi Likuiditas dan Tingginya Suku Bunga**

Oleh:

Didik Kurniawan Hadi

*Chief Economist Assistant* PT Recapital Advisors

Harga minyak dunia yang sempat menembus US\$ 147 per barrel yang menyebabkan harga pangan melejit tinggi dan jatuhnya bank-bank raksasa di seluruh dunia menunjukkan terjadinya kebangkrutan kredit global yang bisa mengarah kepada terjadinya resesi ekonomi. Agustus 2008 ini terulang kembali ledakan gelombang ekonomi di pasar perusmahan AS sebagai akibat dari subprime mortgage yang terjadi tahun lalu. Krisis ini terancam berakhir dengan depresi ekonomi yang mendunia. Depresi ini diperkirakan akan menghentikan pertumbuhan kesejahteraan dan lapangan kerja dalam perekonomian Barat selama kira-kira lebih dari satu dekade. Bangkrutnya Northern Rock di Inggris, Bear Sterns di Amerika (AS), menyebabkan kian muramnya perekonomian dunia.

Imbas dari krisis lembaga keuangan AS pertama-tama amat terasa di pasar modal sebagaimana ditunjukkan oleh kemerosotan tajam IHSG. Kemerosotan IHSG hingga 1150 dan diikuti pelemahan nilai rupiah yang sudah menembus angka Rp 11.700 seiring penguatan dollar AS karena investor mencari perlindungan, terutama di T bills (surat berharga) Pemerintah AS. Pasar obligasi, baik pemerintah maupun korporasi, juga tertekan menimbulkan kerugian besar pada perbankan dan institusi pemegang obligasi lainnya karena penghitungan yang disesuaikan nilai pasar saat itu (*mark-to-market*). Selanjutnya perbankan dihadapkan persoalan ketatnya likuiditas, baik dollar AS maupun rupiah, yang mendorong peningkatan suku bunga deposito yang tinggi. Bahkan, beberapa bank memberi bunga deposito hingga 12-13 persen untuk jumlah tertentu. Untuk mengimbangi pertumbuhan kredit yang amat tinggi, di atas 30 persen, bank amat membutuhkan dana dari masyarakat yang pertumbuhannya tidak sepadan dengan pertumbuhan kredit itu.

Dalam menanggapi imbas dari krisis ini, BI melakukan intervensi cukup besar untuk menjaga stabilitas nilai rupiah. Pemerintah juga berusaha meyakinkan pasar keuangan dan pelaku ekonomi umumnya bahwa perekonomian Indonesia tidak terkait langsung dengan krisis di AS meski terkena imbasnya. Demi menjaga inflasi dan stabilitas nilai rupiah, BI menaikkan suku bunga atau BI *rate* menjadi 9,5%. Kenaikkan BI *rate* yang terus menerus mengalami kenaikan selama lima bulan ini. Tingginya suku bunga ini tentu saja berimbas pada perusahaan-perusahaan dan sektor riil.

Bisnis *multifinance* atau pembiayaan adalah salah satu industri yang terkena dampak kenaikan BI *rate*. Kenaikkan BI *rate* ini diikuti dengan kenaikan suku bunga di perusahaan *multifinance*. Kenaikkan suku bunga ini berkisar antara 1% hingga 2% sehingga rata-rata suku bunga yang dibebankan sekitar 25-40% per tahun. Tingginya suku bunga yang ditentukan BI, membuat keringnya likuiditas di sektor perbankan. Keringnya likuiditas yang ada di perbankan menghambat industri *multifinance* untuk mendapatkan dana. Saat ini kebanya

Untuk bisnis pembiayaan sendiri, keringnya likuiditas di pasar akan sangat menghambat industri *multifinance* untuk mengembangkannya sehingga pertumbuhan sampai akhir tahun ini diprediksi akan terkoreksi 10-20%. industri pembiayaan yang mencakup *consumer finance*, *leasing*, dan anjak piutang mayoritas mengandalkan sumber dana dari pinjaman bank dan sebagian kecil dari pinjaman langsung lainnya dalam negeri dan asing. Sulitnya mendapatkan funding dari bank dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan kredit baru yang memiliki beban suku bunga pembiayaan lebih tinggi menyesuaikan dengan naiknya biaya dana.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), pinjaman yang diterima *multifinance* dari perbankan luar negeri terus mengalami penurunan sejak Juni 2008. Posisi akhir Mei 2008, pinjaman perbankan luar negeri untuk *multifinance* berada pada posisi Rp 31,7 triliun. Kemudian, pada akhir Juni 2008, pinjaman dari luar negeri mengalami penurunan menjadi Rp 31,5 triliun per akhir Juni 2008. Demikian pula pada bulan Juli yang turun menjadi Rp 31,4 triliun.

Tingginya suku bunga yang ditetapkan BI akan berdampak pada menurunnya kualitas pembiayaan, yakni potensi naiknya pembiayaan macet menjadi lebih besar meski kucuran pembiayaan dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena itu para pelaku bisnis di pembiayaan ini harus mencari sumber dana lain. Jika melalui bank lokal sulit mendapatkan dana, maka segera ekspansi untuk menggaet mitra bank asing yang memiliki likuiditas yang tinggi.

Dengan terjadinya kekeringan likuiditas, perusahaan *multifinance* harus lebih banyak mengandalkan dana internal sebagai sumber pendanaan. Oleh sebab itu, perusahaan *multifinance* melakukan beberapa strategi khusus agar dapat bertahan di situasi sulit seperti saat ini. Beberapa diantaranya yakni mendorong kolektibilitas, meningkatkan *quality services*, cukup berhati-hati dalam menyalurkan kreditnya, melakukan *cost cutting* pada operasionalnya, mencoba memperkecil risiko kredit, dan mencoba alternatif untuk melirik sektor riil seperti pertanian dan ketahanan pangan yang lebih tahan terhadap fluktuasi dan mempunyai risiko kecil.

Perusahaan pembiayaan juga harus menerapkan dan merevisi sejumlah target yang telah mereka tetapkan terkait dengan fluktuasi ekonomi seperti sekarang. *Pertama*, memangkas target penjualan sebagai akibat tingginya harga minyak, suku bunga dan kemungkinan default yang lebih besar dari konsumen. *Kedua*, memperketat persetujuan kredit dengan penuh perhitungan dalam menilai kelayakan calon debitur sebelum pencarian kredit. *Ketiga*, agar default (Non Performing Loan) yang dialami tidak terlalu besar, maka para agen atau kolektor harus agresif untuk mengingatkan para debitur untuk segera membayar cicilannya. *Keempat*, melakukan restrukturisasi utang dengan menyeleksi nasabah mereka. *Kelima*, perusahaan *multifinance* melalui asosiasinya harus bersama sama mendorong pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif untuk bisnis ini, misalnya dengan membuka kesempatan kepada *multifinance* mendapat dana dari industri asuransi atau dana pensiun sehingga tak hanya mengandalkan dana dari bank ataupun obligasi. Di samping itu, perlu juga dibuat aturan mengenai kepemilikan asing dalam lembaga pembiayaan.